

ANAK DAN JAJANAN SEKOLAH: PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH DAERAH

Children and Snack Product: Empowerment Healthy Program in the Government Perspective

Anna Triwijayati,¹ Etsa Astridya Setiyati¹, Yudi Setianingsih², Maria Lucia Luciana²

¹Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung

²Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Ma Chung

(anna.triwijayati@machung.ac.id)

ABSTRAK

Pemberdayaan anak akan konsumsi makanan jajanan di sekolah merupakan upaya untuk memastikan anak mampu mengambil keputusan konsumsi dengan tepat dan terlindung dari bahaya jajanan yang tidak sehat. Upaya tersebut antara lain menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui *focus group discussion* dengan instansi pemerintah, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Malang serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dan Kabupaten Malang. Hasil diskusi menunjukkan bahwa pemerintah mengambil peran mengatur regulasi yang berkaitan dengan sekolah, kantin dan Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait dengan jajanan sehat untuk anak. Namun, di sisi lain program-program tersebut belum banyak berkaitan langsung dengan sasaran utama yaitu anak jajanan sekolah. Diperlukan pula upaya lintas sektoral untuk memberdayakan anak yaitu dengan melibatkan sekolah dan orang tua.

Kata kunci: Anak, pemberdayaan, pemerintah, produk jajanan

ABSTRACT

Children empowerment of consuming street food is an attempt to make sure that children can take the right consumption decision and are protected from the danger of unhealthy snacks food. The empowerment effort stake the responsibility of the central and local governments. A qualitative method is used in the research through focus group discussion with some government agencies, namely The Center for Food and Drug Administration (BPOM) in Surabaya, and the Local Health Office of Malang and the Local Department of Industry and Trade of Malang. The discussion results indicate that the government takes the role of setting the regulations relating to schools, canteens and street vendors (PKL) associated with healthy snacks for children. On the other hand, these programs have not been directly related to children as the primary target. The government is confronted with resource problems so that they need cross-sectoral efforts. Schools and parents should be involved in these empowering programs.

Keywords: Children, empowering, government, snack product

PENDAHULUAN

Konteks pasar di Indonesia anak identik dengan kegiatan 'jajan' di sekolah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsumsi jajanan sekolah menjadi kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak di Indonesia. Hal tersebut diperkuat oleh temuan bahwa sebagian besar sekolah memiliki kantin sekolah dan sebagian dari sekolah mengizinkan penjaja makanan keliling berjualan di depan sekolah. Kondisi kantin sekolah juga beragam mulai dari kantin sekolah yang bersih dengan jajanan yang sehat, sampai dengan kantin sekolah apa adanya.

Beberapa kegiatan pemberdayaan anak memang telah dilakukan. Pada Februari 2014 BPOM menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang mengambil tema Keterpaduan Program Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan dihadiri beberapa perwakilan kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan POM, Perguruan Tinggi, organisasi profesi yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (Pergizi Pangan), serta perwakilan dari beberapa industri pangan. Keterlibatan sektor perusahaan swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan perguruan tinggi bersama-sama dengan pemerintah telah disepakati untuk keberlanjutan PJAS 2014. Selain itu Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian pada tahun 2008 mengeluarkan Pedoman Umum Gerakan Makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman bagi Anak Sekolah SD/MI.¹

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah ketika banyak program telah dirancang, tetapi masih terjadi kasus-kasus keracunan jajanan sekolah, produk-produk jajanan yang tidak layak santap dan kondisi kantin sekolah dasar yang masih memprihatinkan. Nampaknya berbagai faktor mulai dari faktor anak dan orang tua, kebijakan sekolah dan ketersediaan kantin yang sehat, peran pemerintah dan kontribusi masyarakat dalam pemberdayaan anak.

Kantin sekolah berhubungan erat dengan penyediaan makanan jajanan sehat untuk anak. Menurut Triwijayati pada tahun 2013 anak mengambil keputusan dengan spontan/*impulsive* dan dapat berarti pula bahwa apa yang tersedia di kantin sekolah itulah yang akan dibeli.² Damanik pada tahun 2009 menemukan bahwa *hygiene* dan sanitasi dari siswa dan penjual jajanan kurang baik.³ Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan pengetahuan yang cukup dari sekolah terkait dengan produk jajanan untuk anak.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten telah banyak berperan dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat baik itu produsen makanan dan juga konsumennya. Namun, selama ini program-program tersebut lebih banyak diarahkan pada produsen atau pengusaha. Program-program pemberdayaan pada anak, kurang terpola dan belum berkelanjutan. Program-program yang disediakan untuk sekolah masih terbatas pada uji sampel jajanan dan diseminasi hasilnya kepada kepala sekolah. Nampaknya keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan untuk pengembangan program masih terbatas. Dengan kata lain, anak belum menjadi fokus bagi program pemberdayaan.

Di sisi lain perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi makanan dalam kemasan memiliki dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Saat ini banyak perusahaan telah berkolaborasi dengan sekolah, tetapi dalam konteks 'semi promosi' bukan sebagai bentuk pemberdayaan. Sebagai contoh produsen dan pemasar produk susu dalam kemasan menstimulasi siswa untuk membeli produknya dengan memberikan hadiah-hadiah kecil. Sejauh ini, belum banyak perusahaan yang mengarahkan CSR-nya untuk pemberdayaan anak sekolah dan jajanan yang dikonsumsi.

Farnsworth dan Dunoskovich pada tahun 2001 menemukan fakta bahwa anak yang dilatih keterampilan berkonsumsi lebih baik dan lebih sehat daripada yang tidak terlatih.⁴ John dan Whitney pada tahun 1986 menyatakan bahwa peningkatan jumlah informasi akan meningkatkan struktur pengembangan pengetahuan pada anak yang lebih tua ≥ 9 tahun.⁵ Menurut BPOM tahun 2006, anak-anak sekolah dan guru, juga harus diberi pengeta-

huan yang memadai mengenai keamanan pangan agar mereka dapat memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi.⁶ Anak yang berdaya akan memiliki daya tawar yang tinggi akan produk makanan yang dibeli sehingga mampu memilih dan memilih makanan yang sehat atau tidak. Dalam jangka panjang anak yang berdaya dapat meminimalisir kasus-kasus yang merugikan anak misalnya masalah kesehatan, pemilihan makanan sehat, konsumsi sayur dan buah dan sebagainya.⁷ Permasalahan yang akan diangkat adalah sejauh mana peta program-program dan kebijakan pemerintah (c.q. BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dalam memberdayakan anak untuk cerdas dalam memilih jajanan sehat.

Sementara itu program pemberdayaan anak di beberapa negara telah difokuskan pada pemberdayaan sekolah. Beberapa gagasan terkait dengan konsep pemberdayaan anak di beberapa negara antara lain adalah antara lain menurut Wilde dan Kennedy pada tahun 2009 yaitu subsidi pemerintah untuk *breakfast and lunch program* di sekolah,⁸ sedangkan menurut *Food Standard Agency (FSA)* tahun 2006 negara Inggris memiliki 13 program *School-based food initiatives*,⁹ dan Morris, Briggs dan Zidenberg-Cherr tahun 2000 menyarankan program *School-based gardens* untuk mendorong anak makan sayur dan buah dari tanaman yang mereka tanam di kebun sekolah,¹⁰ *New South Wales Healthy School Canteen Strategy* pada tahun 2006 menawarkan *Canteen Menu Planning Guide*, suatu program panduan menu kantin sehat di sekolah-sekolah.¹¹ Regulasi pemerintah lokal akan kantin sehat di Santa Catalina, Brazil ditemukan oleh Gabriel *et al*, tahun 2009.¹²

Penelitian terapan ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam hal ini BPOM yang menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor berperan penting dalam keberhasilan Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN-PJAS). BPOM pada tahun 2010 menyatakan bahwa keterpaduan program antar kementerian/lembaga, didukung oleh partisipasi sektor swasta, dapat mendorong pencapaian tujuan aksi nasional di bidang pangan jajanan anak sekolah.¹³ Dari hasil wawancara penelitian sebelumnya, peneliti mengembangkan suatu program pemberdayaan anak sekolah yang terintegrasi. Integrasi program juga telah disarankan oleh Murton pada tahun 2004 kepada sekolah Nova Sco-

tia.¹⁴ Integrasi program pemberdayaan berarti bahwa program tersebut mencakup beberapa program yang saling berkaitan (*inter-related programs*) dan berkesinambungan (*sustainable programs*) dengan melibatkan berbagai pihak yakni sekolah, pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan pihak eksternal juga disarankan oleh Morris *et al*, pada tahun 2000 untuk *school-based gardens program*, yang melibatkan pemerintah lokal, toko/supermarket, dan petani.¹⁵ Keterlibatan semua pihak eksternal masyarakat diperlukan karena pemberdayaan anak sekolah merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah dan sekolah. Ketika semua pihak telah menyadari dan termotivasi untuk terlibat dalam pemberdayaan anak, permasalahan utama adalah tindak lanjut program yang baik ini dalam suatu aksi nyata yang memang benar-benar melibatkan semua pihak. Menurut Kepala BPOM hal ini sangat dibutuhkan antara lain karena akar masalah dalam program Aksi Nasional PJAS untuk tahun 2014 ini adalah komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai fasilitator dalam memberdayakan komunitas sekolah; dana pemerintah yang terbatas; kepedulian, komitmen dan langkah bersama (Beritasatu.com).¹⁶

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pemetaan data sekunder dan *eksploratori* dengan metode kualitatif dengan teknik *indepth interview* untuk mengidentifikasi program dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan anak. Fokus dalam penelitian ini adalah keseluruhan program-program pemberdayaan anak sekolah pada seluruh organisasi yang terlibat, yaitu seluruh program dan kebijakan dari: BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang, program yang dimaksud meliputi tidak terbatas pada : peraturan pemerintah daerah/kota, surat keputusan, rencana jangka panjang dan jangka pendek, program kerja, rencana strategis, kebijakan, dan praktik-praktik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif maupun kualitatif yang bersifat primer maupun sekunder. Data sekunder yang bersifat kuantitatif diperoleh melalui teknik dokumentasi dari organisasi terkait, sedangkan data primer diperoleh dari teknik wawancara mendalam dalam forum FGD. Teknik FGD yang digunakan adalah peneliti akan

mengundang pimpinan atau pengambil kebijakan dalam organisasi yang terkait dengan penelitian ini. FGD bersifat terarah dan dilakukan 3 kali mengingat kesibukan dari berbagai peserta FGD. Instansi yang diundang adalah: BPOM Propinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dan Kabupaten Malang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Teknik analisis data sekunder, digunakan untuk mengidentifikasi program-program dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan anak sekolah, 2) Teknik pemetaan kebijakan, digunakan untuk merancang program pemberdayaan anak sekolahakan produk makanan jajanan sekolah yang mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah, sekolah, perguruan tinggi dan perusahaan, dan 3) Teknik analisis tema dan interaktif, untuk menganalisis hasil FGD

HASIL

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melaksanakan 3 kali FGD dengan beberapa narasumber dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Malang serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dan Kabupaten Malang.

Pandangan umum BPOM Jawa Timur tentang pemberdayaan anak sekolah adalah sebagai berikut:

Hal yang pertama dilakukan adalah memberdayakan komunitas sekolah yang terdiri dari anak didik, guru dan kepala sekolah, saling belajar mengenai keamanan pangan, mengingat kebanyakan di kantin sekolah masih tradisional sekali. BPOM juga memberikan KIE, kepada anak-anak yang antusias mendengarkan.

Program yang dilaksanakan oleh BPOM adalah: 1) Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dimulai tahun 2011 dan berakhir tahun 2015, dengan target 18 ribu sekolah. Kegiatan yang berkaitan dengan PJAS tahun 2015 adalah pengawalan program PJAS yang telah dilakukan di banyak SD, tidak hanya melepaskan begitu saja tetapi juga dilakukan pengawalan di SD-SD tersebut. 2) Sosialisasi dengan beberapa media, diantaranya adalah berupa poster, leaflet, buku, stiker, CD, ma-

teri maupun film, termasuk juga penyebaran kuesioner terkait dengan persepsi dan pengetahuan komunitas sekolah tentang aman pangan PJAS. 3) Melakukan uji *sampling* dan pengujian menggunakan test-kit untuk jajanan yang ada di samping jalan, sekitar sekolah dan kantin. Dari hasil pengujian yang positif tidak aman untuk dikonsumsi adalah sirup dan beberapa lainnya, es yang mungkin menggunakan air mentah atau air sumur, jelly berwarna, mie bihun berformalin, bakso yang dicurigai berformalin, dan juga kudapan ringan ikan. 4) Beberapa modul sudah disiapkan, dokumentasi, penerapan keamanan pangan dan pelatihan petugas kantin. 5) Pengerjaan kuesioner yang dievaluasi dan dilakukan audit internal dengan menyediakan internal auditor di masing-masing kantin untuk pemantauan, pemberian piagam untuk yang menerapkan keamanan pangan, dan terus dilakukan pemantauan terhadap konsistensi kantin yang mendapat piagam.

Berdasarkan cuplikan paparan dari narasumber BPOM Jawa Timur, program-program yang dilaksanakan oleh BPOM Jatim adalah : Program Pangan Jajanan Anak Sekolah. Sosialisasi ke anak dan sekolah dengan beberapa media, diantaranya adalah berupa poster, leaflet, buku, stiker, CD, materi maupun film. Uji *sample jajanan* dan pengujian menggunakan *test-kit* untuk jajanan yang ada di samping jalan, sekitar sekolah dan kantin. Pemberdayaan kantin, melalui penyediaan media modul, dokumentasi penerapan keamanan pangan dan pelatihan petugas kantin, audit internal dengan menyediakan internal auditor, dan pemberian piagam untuk yang menerapkan keamanan pangan

Dinas Kesehatan memberikan pandangan umum tentang anak sekolah, jajanan sehat di sekolah dan upaya pemberdayaannya.

Anak-anak sekolah masih banyak yang jajan di luar sekolah, padahal jajanan di luar sekolah masih banyak yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya namun penggunaannya melebihi dosis, anak-anak tidak begitu tahu tentang hal tersebut. Selain itu Orang tua setiap hari memberikan uang saku kepada anak sehingga hal tersebut dapat memengaruhi sifat konsumtif anak.

Anak-anak memang membutuhkan asupan

gizi yang memang harus banyak sesuai kecukupan gizinya anak itu sendiri. Kita kadang-kadang sering memberikan penyuluhan, maupun memberikan bimbingan dan pembinaan. Namun ada beberapa permasalahan terutama memang adanya kesibukan orang tua itu sendiri untuk menyiapkan sarapan.

Dinas kesehatan selama ini melihat bahwa memberdayakan anak masih menemui banyak kendala, dan terutama yang terbesar adalah kemauan orang tua untuk menyiapkan sarapan dan/atau memberikan bekal. Anak sekolah dinilai belum begitu mengetahui bahaya jajanan di luar sekolah. Program yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan daerah (kota dan kabupaten) untuk memberdayakan anak antara lain adalah dipaparkan dalam cuplikan FGD berikut ini:

Pembekalan pola makan bergizi, jenis-jenis makanan yang dilarang karena mengandung bahan tambahan makanan. Untuk anak sekolah hal tersebut masih agak sulit, namun paling tidak pengenalan tentang zat warna, mereka sudah tahu. Belum ada kemampuan atau daya dari pemerintah untuk mengutus orang untuk memberikan penyuluhan atau TOT karena adanya keterbatasan. Sekolah di Malang jumlahnya banyak, dalam setahun tidak semua sekolah dapat dilakukan penyuluhan.

Monitoring untuk penjualan jajanan di kantin. Kebanyakan jajanan untuk anak-anak sekolah ini, jumlah kalorinya itu masih jauh di bawah persyaratan yang seharusnya. Harusnya yang tersedia dari jajanan itu kurang lebih antara dua ratus sampai tiga ratus untuk satu porsi, kurang bervariasi bahan yang digunakan untuk membuat makanan jajanan itu. Itu didominasi hanya oleh zat gizi yang tunggal.

Mengedukasi anak-anak supaya mereka itu pilih makanan yang lebih sehat. Kami membina dokter kecilnya itu. Di samping kita nanti mempelajari tentang screening kesehatan dan sebagainya, tapi tentang makanan sehat, jajan sehat, itu anak-anak sudah jelas itu, sudah mampu saya kira itu untuk memberikan penyuluhan ke sesama teman-temannya.

Keterlibatan lintas sektoral. Jadi di mana PKK kita libatkan, Dinas Perdagangan, BPOM. Itu memang kami bekerjasama

yang pertama yang kalau Perdagangan maupun BPOM, itu memang kita mengambil sampel jajan-jajanan. Nah, kemudian juga kita bekerja sama dengan PKK, ya. Ini ada lomba pengelolaan jajan anak sekolah yang sehat bagaimana.

Penyuluhan mengenai syarat sanitasi kepada sekolah, melakukan foto dokumentasi sebelum turun mengadakan penyuluhan, dan ternyata yang menjadi masalah adalah adalah tidak adanya tempat untuk mencuci peralatan, dan ini juga terjadi di banyak sekolah lainnya.

Penyuluhan kepada 50 pedagang selama 2 hari dan memberikan sertifikat bahwa telah mengikuti pelatihan tentang makanan.

Penyuluhan kepada sekolah-sekolah adhi wiyata, memberikan pembinaan kepada warung-warung di sekolah itu juga kepada penanggung jawab UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), waktunya juga sama yaitu 2 hari, dan yang ketiga adalah pemberian sertifikat laik higienis kepada warung sekolah yang telah memenuhi syarat checklist uji secara mikrobiologi untuk makanan siap saji dengan menguji bakteri coli.

Penyuluhan untuk dapur tempat penyediaan makanan yang bersih dan memenuhi persyaratan termasuk tempat cuci yang memenuhi syarat dengan air cucian yang mengalir.

Peran Dinas Kesehatan sebagai pembina UKS untuk kesehatan terhadap kantin anak, jadi bergerak ke arah kegiatan UKS, terutama bahwa turunnya UKS karena ada kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Keadaan kesehatan anak sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajarnya.

Kegiatan/program dinas kesehatan untuk pemberdayaan anak sekolah, dilaksanakan dengan sasaran pada anak sekolah, kantin dan program dokter kecil. Mengingat bahwa dinas memiliki keterbatasan tenaga dan dana maka keterlibatan lintas sektoral sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas perindustrian dan perdagangan pandangan umum tentang pemberdayaan anak sekolah.

Makanan memang sebagai kebutuhan na-

mun disisilain pengawasannya masih sangat minim, baik dari sekolah, orang tua, dan anak. Pengetahuan masalah makanan yang dikonsumsi sangat minim.

Dinas perindustrian dan perdagangan memang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan anak, tetapi lebih berkaitan dengan permasalahan pedagang kaki lima. Terkait dengan penanganan pedagang kaki lima yang berjualan makanan untuk anak, dinas perindustrian dan perdagangan memilih untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terpadu. Sasaran program adalah bahan tambahan pangan dan non pangan berbahaya yang dicampurkan ke makanan.

Tahun ini kita mengajukan tim untuk pengawasan terpadu barang berbahaya dicampurkan dalam pangan. Dinas Kesehatan pernah mengambil sampling ke beberapa pedagang, dan hasilnya ditindaklanjuti. Kira-kira upaya yang mungkin atau aturan atau mungkin kebijakan yang sudah dilakukan oleh Disperindang adalah sifatnya pembinaan, bukan eksekusi. Jadi kita enggak akan mematikan pedagang.

PEMBAHASAN

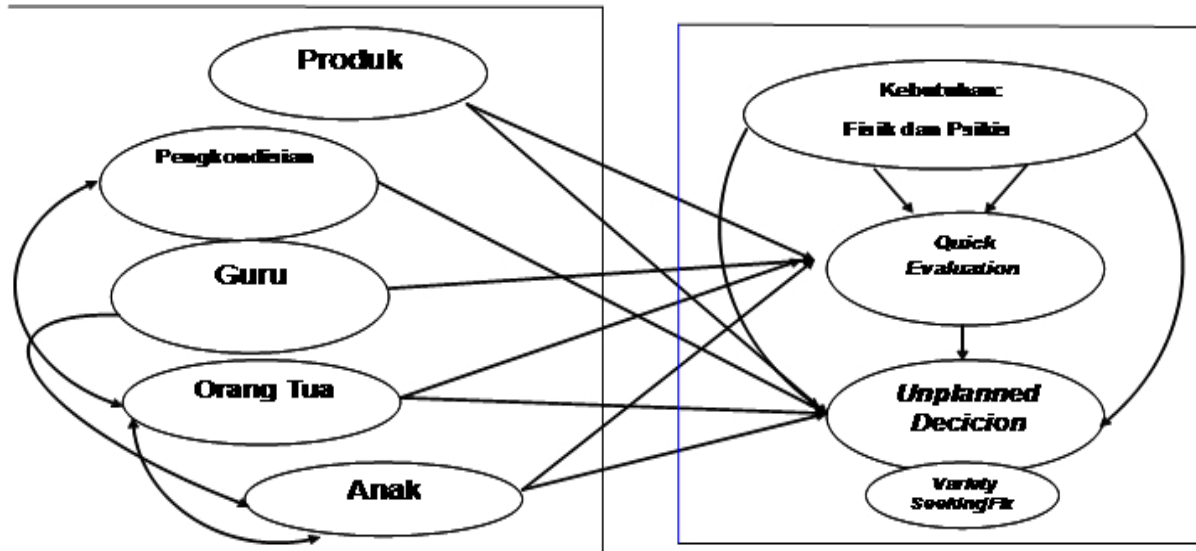
Masalah anak dan jajanan belum banyak diperhatikan oleh pemerintah, komisi perlindungan anak maupun berbagai instansi. Sebagian besar sudut pandang permasalahan tentang anak dan kantin sekolah adalah masalah gizi. Secara khusus di Indonesia penelitian yang dilakukan selama ini antara lain oleh Nuryati pada 2005 adalah penelitian-penelitian parsial tentang anak terutama hanya mengambil sudut perpektif hubungan antara konsumsi dan gizi.¹⁷ Demikian juga halnya penelitian dari Hartini tahun 2005.¹⁸ Yulianingsih pada tahun 2009 juga meneliti tentang konsumsi jajan pada anak dan efeknya pada gizi.¹⁹ Damanik pada tahun 2009 menghubungkan higiene sanitasi makanan di sekolah dengan kesehatan anak.²⁰ Sebagian penelitian lain menghubungkan anak dengan iklan makanan. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa makanan jajanan tidak semuanya sehat. BPOM menyatakan bahwa 40% jajanan anak sekolah tidak sehat.²¹ *Food Watch* tahun 2007 menemukan bahwa cemaran mikroba pada bakso adalah yang paling tinggi, yaitu lebih dari 40% jika dibandingkan dengan cemaran

mikroba pada mie ataupun kudapan.²²

Anak, makanan jajanan dan sekolah banyak menjadi sorotan dalam beberapa kasus keracunan atau pencemaran makanan. Badan POM RI pada tahun 2006 menyatakan bahwa frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan tahun 2004 tertinggi terjadi pada anak Sekolah Dasar (SD), yaitu 19 kejadian dengan jumlah korban sakit sebanyak 575 orang.²³ Dari laporan Republika tahun 2010 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditemukan sebanyak 32% jajanan anak sekolah yang dijual di lingkungan sekolah tergolong tidak sehat.²⁴ Beberapa kasus lain menunjukkan hal serupa setidaknya bila dilihat dari kasus-kasus yang ditemukan oleh Badan POM (InfoPOM) tahun 2008.²⁵ Temuan ini juga didukung oleh peneliti Judarwanto tahun 2010.²⁶ *Food Watch* pada tahun 2007 juga melaporkan kasus yang sama pada lokasi yang berbeda.²⁷ InfoPOM pada laporan tahun 2008 menyatakan bahwa pada tahun 2007 terjadi 28 kejadian KLB Keracunan Pangan (16%) yang terjadi di lingkungan sekolah dengan korban terpapar 3894 siswa dan korban yang sakit 1336 siswa. Pangan jajanan berkontribusi sebesar 28,57% sebagai pangan penyebab KLB Keracunan Pangan di lingkungan Sekolah dan siswa sekolah dasar (SD) merupakan kelompok yang paling sering (67%) mengalami keracunan pangan jajanan anak sekolah.²⁸

Sementara itu bila dilihat dari sumber dan lokasi kasus, data Badan POM RI tahun 2004 menunjukkan bahwa makanan jajanan termasuk dalam empat sumber pangan penyebab keracunan pangan, selain makanan rumah tangga, jasa boga, makanan olahan. Kasus keracunan di sekolah berada di urutan kedua setelah kasus keracunan makanan di tempat tinggal. Terjadinya keracunan di lingkungan sekolah antara lain disebabkan oleh ditemukannya produk pangan di lingkungan sekolah yang tercemar bahan berbahaya, kantin dan pangan siap saji di sekolah yang belum memenuhi syarat higienitas dan donasi pangan yang bermasalah. Oleh karena itu, Kepala Badan POM RI tanggal 15 September 2004 mengeluarkan surat edaran No. KS.01.03.51.4099 mengenai Pedoman Pemberian Pangan untuk Konsumsi Anak Sekolah.

Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa program pemberdayaan anak yang dilakukan oleh unsur pemerintah, dalam hal ini BPOM dan Dinas



Sumber: Triwijayati (2013)

Gambar 2. Model Pengambilan keputusan Pembelian Makanan Jajanan oleh Anak

Kesehatan, sebagian besar tidak langsung berkaitan dengan perilaku anak dan konsumsi jajanan. Sebagian program masih diarahkan pada lingkungan sekitar anak dan kegiatan jajanan, yaitu kantin, sekolah, pedagang makanan depan sekolah dan jajanan itu sendiri.

Sekolah dan kantin merupakan kesatuan penunjang kesehatan anak sekolah. Sekolah dan kantin memiliki peran yang sangat penting. Sejauh ini sekolah masih menjadi tempat penyampaian ilmu pengetahuan tentang jajanan sehat. Namun, pengetahuan tersebut sebatas pada informasi dari guru di kelas misalnya dari mata pelajaran Penjaskes (pendidikan jasmani dan kesehatan) atau dari IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Sejauh ini belum ada satu materi yang lengkap tentang konsumsi makanan, jajanan dan lingkungan sehat. Beberapa negara lain misalnya Australia, USA dan negara di Eropa, materi jajanan sehat menjadi bagian dari kurikulum siswa sekolah dasar.

Kantin sekolah di Indonesia pada umumnya dan di Kota Malang khususnya memiliki bentuk dan layanan yang sangat beragam. Beberapa sekolah dengan kategori Adiwiyata memiliki kantin yang bersih dan memiliki fasilitas yang memadai misalnya tempat cuci piring dengan air mengalir, tempat cuci tangan, tempat sampah yang bersih dan tempat duduk yang lapang. Namun, tidak sedikit tempat kantin sekolah dasar yang belum la-

yak dari segi ketersediaan fasilitas dan kebersihannya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi satu topik dan fenomena yang sangat luas. Keberadaan PKL menjadi masalah tersendiri bagi sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. PKL jajanan sekolah menjadi pemandangan yang rutin ada di depan sekolah-sekolah dasar di Indonesia. PKL jajanan depan sekolah dapat menjadi masalah bagi kesehatan anak ketika jajanan yang dijual tidak mengandung nilai gizi dan atau mengandung bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan anak.

Program pemberdayaan anak sekolah sejauh ini belum tepat sasaran pada anak dan pada konteks membangun kompetensi anak dalam mengenal dan mampu memilih jajanan yang sehat dan berguna. Sejauh ini sasaran program masih berada di sekitar anak, yakni pada sekolah, kantin dan PKL. Ketidaktepatan sasaran kegiatan pemberdayaan anak terjadi karena beberapa faktor internal pada anak dan anak mengambil keputusan serta faktor pemberi layanan edukasi kesehatan anak, dalam hal ini adalah instansi pemerintah.

Langkah-langkah anak dalam mengambil keputusan ternyata sudah cukup kompleks. Dalam penelitian sebelumnya tahun 2013 (Gambar 1), Triwijayati menyebutkan bahwa faktor yang dapat mendorong anak membeli jajanan adalah faktor

produk jajanan itu sendiri, guru di sekolah, pengkondisian dalam keluarga, peran orang tua dan faktor internal anak itu sendiri.²⁹ Unsur makanan jajanan yang mendorong anak membeli jajanan adalah karena harganya yang sesuai dengan uang saku dan rasanya yang dianggap enak atau sesuai dengan preferensi anak. Meski memiliki pengetahuan akan produk jajanan, anak cenderung kurang mempertimbangkan masalah higienitas dan gizi makanan. Sementara orang tua memiliki peran membiasakan anak mengkonsumsi jajanan. Dalam penelitian sebelumnya tahun 2012 oleh Triwijayati diketahui bahwa pengetahuan dan kekhawatiran orang tua menjadi dasar referensi orang tua kepada anak terkait dengan jajanan sehat di sekolah. Kekhawatiran orang tua menjadi bahan yang direferensikan orang tua untuk menambah pengetahuan anak dan referensi orang tua menentukan keputusan pembelian jajanan oleh anak. Dengan kata lain sikap permisif orang tua berhubungan dengan kepatuhan anak dan menentukan pembelian jajanan sekolah.³⁰

Kebutuhan anak akan jajanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu motif fisik dan motif psikis. Kebutuhan fisik ditandai dengan rasa lapar dan haus yang terutama terjadi ketika anak mengeluarkan banyak energi saat bersekolah. Kebutuhan psikis ditandai dengan ketiadaan alasan bagi anak untuk mengkonsumsi jajanan. Anak *jajan* memang karena ingin *jajan* dan tidak ada alasan khusus yang mendorong mereka *jajan*.

Tahapan evaluasi konsumsi oleh anak dilakukan dengan cepat dan anak tidak merasa 'kehilangan' ketika jajanan yang diinginkan tidak tersedia. Anak juga tidak terlalu menunjukkan keterlibatan dalam mengevaluasi. Anak hanya mempertimbangkan faktor harga dan rasa jajanan. Tahap evaluasi adalah tahap respon atas stimulus yang sangat cepat dan atraktif. Hal inilah jawaban anak belum memahami aspek gizi dan manfaat dari jajanan sekolah yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, edukasi pada anak sekolah menjadi tidak hanya terbatas pada kantin, sekolah dan PKL.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Triwijayati tahun 2013 memberikan gambaran bahwa anak tidak secara tetap merencanakan pembelian. Alasan membeli jajanan adalah karena *pengin aja*, lapar, dan *suka aja*.³¹ Jawaban tersebut menunjukkan beberapa makna: impulsifitas atau *unplanned*

behavior, yang terungkap dari ungkapan *pengin aja* dan *suka aja*; atau ketidaktahuan mengungkapkan alasan *jajan*, yang bisa terjadi karena memang tidak ada alasan untuk *jajan*. Jadi keputusan pembelian jajanan bisa terjadi tanpa pertimbangan karena anak memiliki daya beli, terpapar tawaran jajanan di kantin atau karena lapar. Dalam penelitian tersebut tidak ditemukan hasil bahwa anak mengetahui, mengenali, menyadari dan mampu memilih jajanan sekolah karena faktor gizi.

Permasalahan mendasar dari anak dalam konsumsi jajanan sangatlah kompleks. Anak dan jajanan bukan hanya permasalahan membuat anak paham tentang bahaya konsumsi jajanan sembarangan, tetapi juga terkait dengan keberadaan PKL dan keterlibatan orang tua. Selain itu, instansi pemerintah dan dinas terkait melakukan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) masing-masing.

Kompleksitas pada permasalahan anak memerlukan keterlibatan para pihak di luar pemerintah. Bila sasaran program pemberdayaan adalah pada anak, maka harus diakui bahwa pemerintah di daerah/kota memiliki keterbatasan sumberdaya. Secara teknis masalah anak dan jajanan merupakan masalah sekolah dan orang tua. Namun, di sisi lain kompetensi sekolah dan orang tua juga sama-sama terbatas bila sejauh ini belum ada materi pemberdayaan yang diintegrasikan intra kurikulum atau sekurang-kurangnya menjadi kegiatan ekstra kurikuler. BPOM dan dinas kesehatan sendiri mengakui perlunya keterlibatan lintas sektoral untuk memberdayakan anak sekolah. Beberapa kegiatan yang diusulkan oleh instansi pemerintah adalah: 1) Pembuatan Materi pendidikan untuk anak sekolah. Upaya ini dilakukan dengan cara memasukkan materi tentang cara mengkonsumsi yang cerdas (*smart consumer*) untuk anak sekolah dasar. Bila materi tidak dapat dimasukkan dalam kurikulum, materi dapat diberikan dalam kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat interaktif. 2) Program sekolah yang melibatkan orang tua. Perlu dipikirkan materi pelatihan yang terstruktur untuk orang tua terkait dengan makanan sehat untuk anak dan pendidikan konsumsi untuk anak

Materi pendidikan untuk anak sekolah dan orang tua harus mencakup faktor ragam jajanan sehat dan yang tidak sehat, jajanan yang berbahaya, dan dampak jajanan bagi kesehatan anak. Selain itu

juga perlu adanya materi tentang lingkungan sekitar proses penyiapan dan penyajian jajanan sekolah serta perilaku sehat untuk konsumsi jajanan sekolah. Meski sejauh ini upaya pemerintah setempat telah banyak dilakukan, diperlukan integrasi upaya pemerintah bersama dengan pihak lain. Dalam penelitian sebelumnya, *Health Promoting Schools* oleh *Community Health, ACT Health and the Curriculum Development and Support Unit, ACT Department of Education and Training (DET)* pada tahun 2007 memberikan contoh model integrasi yakni *Health Promoting Schools* yang merupakan integrasi kurikulum sekolah, lingkungan dan organisasi sekolah serta komunitas luar sekolah.³²

Keterlibatan pihak eksternal juga disarankan oleh Morris *et al.* (2000) untuk *School-based gardens program*, yang melibatkan pemerintah lokal, toko/supermarket, dan petani.³³ Keterlibatan semua pihak eksternal masyarakat diperlukan karena pemberdayaan anak merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah dan sekolah. Unsur masyarakat meliputi orang tua, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi dan perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program pemerintah untuk mengatasi masalah jajanan anak sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar program menunjukkan bahwa fokus kegiatan diarahkan bukan pada pemberdayaan anak namun pada kantin dan sekolah. Realita tersebut terjadi karena permasalahan anak dan keputusan konsumsi jajanan sangat kompleks karena melibatkan pengaruh orang tua, guru, kelompok referensi (teman), dan karakter anak. Selain itu pemerintah daerah sangat terikat dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan menghadapi berbagai kendala teknis terkait dengan sumber daya yang ada. Hasil diskusi dengan beberapa dinas terkait dengan masalah anak dan jajanan terungkap bahwa meski banyak program yang ingin diimplementasikan pada anak, kantin dan sekolah, tetapi daya cakupan program masih terbatas.

Beberapa kegiatan yang diusulkan oleh instansi Pemerintah adalah pembuatan materi pendidikan jajanan sehat untuk anak sekolah. Materi pendidikan untuk anak sekolah dan orang tua harus mencakup faktor ragam jajanan, jajanan yang

berbahaya, dan dampak jajanan bagi kesehatan anak. Selain itu juga perlu adanya materi tentang lingkungan sekitar proses penyiapan dan penyajian jajanan sekolah serta perilaku sehat untuk konsumsi jajanan sekolah. Program tersebut harus melibatkan orang tua sebagai sasaran pendamping karena orang tua berperan penting bagi perkembangan dan kesehatan anak. Dengan demikian untuk dapat memberdayakan anak agar menjadi cerdas dalam berkonsumsi maka diperlukan program lintas sektoral di luar unsur pemerintah yakni sekolah, perusahaan dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. Pedoman Umum Gerakan Makan Bergizi Seimbang Dan Aman Bagi Anak Sekolah SD/MI. Jakarta: Departemen Pertanian; 2008.
2. Triwijayati, A. Studi Fenomenologi Eksplorasi Model Pengambilan Keputusan Konsumen Anak pada Konsumsi Jajanan Sekolah, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 2013; 12 (1): 1-20
3. Damanik, M. Tindakan Murid dan Penjual Makanan tentang Higiene sanitasi Makanan di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan. [Skripsi]. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 2009.
4. Farnsworth, BJ, Dunoskovich, JH. Consumer Skill Activities Kindergarten Through Sixth Grade. *Education*. 2001; 101 (2).
5. John, DR and Whitney Jr, J. The Development of Consumer Knowledge in Children: A Cognitive Structure Approach. *Journal of Consumer Research*. 1986; 12 (March).
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Laporan Lokakarya Jejaring Intelijen Pangan Pengembangan Kajian Risiko Kimia dalam Program Keamanan Pangan di Indonesia, Kerjasama Badan POM RI dengan WHO Indonesia, 5 Desember 2006. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan; 2006.
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; 2006.

8. Wilde, P, Kennedy, M. The Economics of a Healthy School Meal. CHOICES, The Magazine Of Food, Farm And Resource Issues.2009; 3rd Quarter 24 (3).
9. Food Standard Agency. School-based Food Initiatives. [Diakses tanggal 15 April 2014] www.food.gov.uk.
10. Morris, J, Briggs, M, Zidenberg-Cherr, S. School-based Gardens can Teach Kids Healthier Eating Habits. California Agriculture. 2000; 54 (5): 40-46.
11. New South Wales Department of Health and New South Wales Department of Education and Training. New South Wales: NSW Healthy School Canteen Strategy: Canteen Menu Planning Guide; 2006.
12. Gabriel, CG, Vasconcelos, FAG, Andrade, DF, Schmitz, BAS. First Law Regulating School Canteens in Brazil: Evaluation After Seven Years of Implementation. Archivos Latinoamericanos De Nutricion.Organo Oficial de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición2009; 59 (2).
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; 2010.
14. Murton, M. Food and Nutrition in Nova Scotia Schools: An Environmental Scan of Key School Informants. Healthy Foods in Nova Scotia Schools Steering Committee. 2004; June.
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Focus Group Discussion (FGD) Lintas Sektor Pangan Jajanan Anak Sekolah. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; 2014.
16. Beritasatu.com. Waspada Empat Jajanan Anak Sekolah ini, Diakses tanggal 15 April 2014
17. Nuryati, W. Hubungan antara frekuensi jajan di sekolah dan status gizi siswa kelas IV dan V SD Negeri Wonotingal 01-02 Candisari Semarang tahun ajaran 2004/2005 [Skripsi]. Semarang: Universitas Negeri Semarang; 2005.
18. Hartini. Hubungan Pola Pendidikan Gizi Anak dalam Keluarga dengan Pola Konsumsi Makanan Jajanan Miskin Gizi (Studi Anak Kelas IV-VI SDN Krapyak Lor 1 Kota Pekalongan [Skripsi]. Semarang: Universitas Negeri Semarang; 2005.
19. Yulianingsih, P. Hubungan Pengetahuan Gizi Dengan Sikap Anak Sekolah Dasar Dalam Memilih Makanan Jajanan Di Madrasah Ibtidaiyah Tanjunganom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri [Skripsi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah; 2009.
20. Damanik, M. Tindakan Murid dan Penjual Makanan tentang Higiene sanitasi Makanan di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan. [Skripsi]. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 2009.
21. Triwijayati, A. Studi Fenomenologi Eksplorasi Model Pengambilan Keputusan Konsumen Anak pada Konsumsi Jajanan Sekolah, Jurnal Manajemen dan Bisnis. 2013; 12 (1): 1-20.
22. Food Watch. *System Keamanan Pangan Terpadu*, Vol 1. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; 2007.
23. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan WHO. Final report: Development of Food Safety Educative Material for Children, WHO Project No INO FOS: OSES-1/P-6/A-1&2. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; 2006
24. Republika, 32 Persen Jajanan Anak Sekolah Tidak Sehat, (Online media). [Diakses 1 Mei 2010]. Available at: masyarakatmandiri.org.
25. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. InfoPOM. Vol. 9, no 6, November. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2008
26. Judarwanto, W. Perilaku Makan Anak Sekolah, [Online article) 2010; Diakses 16 Maret 2010. Available at www.gizi.net/makalah/.../perilaku%20makan%20anak%20sekolah.pdf.
27. Food Watch. *System Keamanan Pangan Terpadu*, Vol 1. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; 2007.
28. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. InfoPOM. Vol. 9, no 6, November. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2008
29. Triwijayati, A. Studi Fenomenologi Eksplorasi Model Pengambilan Keputusan Konsumen Anak pada Konsumsi Jajanan Sekolah, Jurnal Manajemen dan Bisnis. 2013; 12 (1): 1-20.
30. Triwijayati, A. Kompetensi Anak dalam Mengambil Keputusan Konsumsi serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak dalam Mengonsumsi Makanan Jajanan, Jurnal Ap-

- likasi Manajemen. 2012; 10 (2): 310-317.
31. Triwijayati, A. Studi Fenomenologi Eksplorasi Model Pengambilan Keputusan Konsumen Anak pada Konsumsi Jajanan Sekolah, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 2013; 12 (1): 1-20.
 32. Community Health, ACT Health and the Curriculum Development and Support Unit, ACT Department of Education and Training (DET). *The Food in ACT Schools Guidelines: Pre-school to Year 12*. Canberra: Australian Capital Territory; 2007
 33. Morris, J, Briggs, M, Zidenberg-Cherr, S. School-based Gardens can Teach Kids Healthier Eating Habits. *California Agriculture*. 2000; 54 (5): 40-46.